

MASALAH-MASALAH PENDIDIKAN NASIONAL

M. Sartibi

DOSEN STISNU NUSANTARA TANGERANG

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu prasyarat maju dan berkembangnya suatu bangsa. Perkembangan global saat ini mengharuskan dunia pendidikan menyesuaikan format kurikulum agar dapat bersaing dan lebih kompetitif. Negara yang maju dapat dipastikan memiliki kualitas pendidikan yang baik, sedangkan Negara atau bangsa yang terbelakang dipastikan terdapat rendahnya kualitas pendidikan dinegeri tersebut. Indonesia sebagai Negara berkembang, sampai saat ini konsern memperhatikan kualitas pendidikan. Negara ini sendiri samapi saat ini, masih dihadapkan dengan realitas rendahnya kualitas pendidikan yang ada saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan minimnya peserta didik di daerah-daerah serta tidak tertariknya pasar untuk menyerap lulusan peserta didik di Indonesia, tak ayal hal tersebut menjadi PR bagi pemerintahan saat ini. Masalah-masalah pendidikan nasional menjadi perhatian khusus, sehingga untuk mengetahui rendahnya kualitas suatu pendidikan, diperlukan adanya penganalisaan yang tepat. Setidaknya terdapat empat point pembahasan yang menjadi standarisasi maju dan berkembangnya kualitas pendidikan, antara lain : mutu pendidikan, efesiensi lembaga pendidikan, sekolah sebagai lembaga pendidikan dan pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan.

Key word : pendidikan, kualitas, peserta didik, nasional, bangsa.

Pendahuluan

A. Latar belakang

Untuk mengetahui dan mengevaluasi penilaian tinggi rendahnya kualitas dari suatu pendidikan, diperlukan adanya penganalisaan yang tepat terhadap masalah-masalah yang terjadi di dunia pendidikan. Hal ini berguna untuk pengambilan kebijakan yang tepat didalam pendidikan sehingga adanya usaha-usaha perbaikan yang dapat diaplikasikan dalam proses pendidikan. Masalah-masalah yang terjadi didalam pendidikan di Indonesia sudah makin kompleks, ini ditandai dengan banyaknya temuan-temuan didalam proses pendidikan yang sudah tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan bahkan Indonesia termasuk Negara yang tertinggal dengan Negara-negara berkembang lainnya bahkan Negara maju terutama dibidang pendidikan. Inilah yang menjadi pusat perhatian kita sebagai pendidik dan orang yang berada dalam dunia pendidikan sehingga dapat memperbaiki hal tersebut dan meminimalisirkan masalah-masalah yang terjadi.

Sebelum membahas masalah apa saja maka kita perlu mengerti dahulu pengertian dari masalah pendidikan itu sendiri.

“ Masalah pendidikan adalah tidak terpenuhinya antara tujuan dan harapan yang diinginkan didalam pendidikan dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi dilapangan. “

Adapun masalah pendidikan menurut P.H Combs dibagi menjadi 4 Kelompok, yaitu :

1. Masalah daya tampung
2. Masalah mutu pendidikan (kualitas pendidikan)
3. Masalah kelambanan dan ketidak efisienan lembaga pendidikan
4. Semakin lebarnya *gap* antara Negara maju dan Negara berkembang

Masalah pendidikan perlu penganalisaan dan pengevaluasian, sehingga kita dapat menentukan solusi yang tepat dalam memecahkan masalah-masalah tersebut.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas. Maka permasalahan pendidikan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :

1. Masalah daya tampung
2. Masalah mutu pendidikan (kualitas pendidikan)
3. Masalah kelambanan dan ketidak efisienan lembaga pendidikan
4. Semakin lebarnya *gap* antara Negara maju dan Negara berkembang

Pembahasan

A. Ciri-ciri Pendidikan di Indonesia

Cara melaksanakan pendidikan di Indonesia sudah tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia, sebab pendidikan Indonesia yang dimaksud di sini ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi melalui bidang studi-bidang studi yang mereka pelajari. Pikiran para siswa/mahasiswa diasah melalui pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya.

Namun dengan konsep pendidikan yang telah disebutkan diatas, pendidikan di Indonesia belum menjawab seluruh persoalan-persoalan yang ada didalam dunia pendidikan itu sendiri. Sebagai contoh : pendidikan di Indonesia belum dapat mencapai target kualitatif dan kuantitatif yang maksimal. Target kualitatif disini adalah para pelajar dan mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan dan pengajaran di Indonesia masih kalah bersaing dengan para pelajar atau mahasiswa di luar negri, mengapa hal ini bisa terjadi? Ini adalah pertanyaan terbesar kita sebagai tenaga pendidik, padahal waktu belajar mereka hampir sama dengan waktu pembelajaran kita di Indonesia. Anak didik kita hanya mendapat pentransferan ilmu semata namun ketika dihadapkan pada daya saing pengalaman dan orientasi hasil ilmu yang didapatkan tidak sejalan dengan profesinya masing-masing, contoh : seorang yang sudah lulus dengan gelar sarjana teknologi masih berfikir saya ingin bekerja dimana dengan gaji berapa?.

Sedangkan ketertinggalan kita dari segi kuantitatif yaitu jumlah peserta didik yang selesai hingga perguruan tinggi masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Itupun belum termasuk jumlah sarjana dan alumni sekolah kejuruan yang masih bergelar

“penganguran”. Selain itu jumlah tenaga pendidik yang professional dan handal juga masih sangat sedikit. Sehingga banyak tenaga-tenaga pendidik yang hanya berpaku hanya pada buku pegangan dalam proses pendidikan, sehingga hasil pendidikan dirasakan tidak maksimal kepada peserta didik, maka wajar saja jika hasil dari anak didik kita tidak mendapatkan ilmu yang maksimal. Cuma mendapatkan ilmu sesuai dengan buku pegangan guru saja.

B. Pengelompokan masalah - masalah pendidikan

Masalah tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dibawah ini :

a. Masalah daya tampung

Masalah daya tampung siswa menjadi hal yang penting sangat berpengaruh terhadap proses pemerataan pendidikan. Apabila daya tampung yang tidak seimbang dengan jumlah peserta didik yang diterima akan menimbulkan efektifitas belajar yang berkurang. Hal-hal yang menyebabkan daya tampung tidak mencukupi diantaranya yaitu :

- Keterbatasan dana pendidikan
Pemerataan pendidikan hingga didaerah dapat dicapai bila dana pendidikan mencukupi, terukur, dan tepat sasaran.
Kemajuan pendidikan Indonesia terbentuk oleh anggaran yang belum terpenuhi secara maksimal walaupun pemerintah telah berupaya menyiapkan anggaran pendidikan sejumlah 20% dari APBN.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan berkaitan erat dengan ketersediaannya sarana dan prasarana pendidikan. Satuan pendidikan yang berkualitas dalam proses penyelenggaraan pendidikan selalu berupaya untuk melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kekinian. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai pada satuan pendidikan tertentu merupakan salah satu masalah dalam menentukan daya tampung peserta didik yang secepatnya harus dapat segera dilengkapai sesuai dengan kebutuhan yang rasional.
- Kurangnya tenaga guru / pendidik
Kekurangan guru/pendidik merupakan salah satu masalah dalam menentukan daya tampung peserta didik dalam satuan pendidikan.
Secara nasional Indonesia kekurangan 400.000 guru dengan distribusi yang tidak merata dan terfokus pada daerah tertentu atau perkotaan (Prof.Dr.M.Surya).
Tindakan pemerintah secara komprehensif diperlukan secepatnya, sebab bila hal ini dibiarkan akan memiliki dampak terhadap pemerataan pembangunan secara nasional terutama dibidang pendidikan itu sendiri.
- Peranan swasta yang belum maksimal
Aksesibilitas atau daya tampung sekolah yang tersedia di Indonesia hanya mencapai separuh dari jumlah siswa yang ada.
Peran sekolah swasta dan sekolah terbuka cukup signifikan mengingat makin tingginya jumlah siswa setiap tahun. Peran pendidikan swasta yang diberikan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dipandang belum cukup maksimal, mengingat keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Adanya dikotomi antara sekolah negeri dan swasta
IMAGE dikotomi negeri dan swasta yang masih melekat pada masyarakat Indonesia. Hal ini mendorong orang tua untuk menyekolahkan anaknya

disekolah negeri dan menganggap sekolah swasta adalah sekolah nomor dua. Kondisi ini telah menggiring opini bahwa satu-satunya sekolah yang baik dan berkualitas adalah sekolah negeri. Dengan demikian maka banjir murid disekolah negeri cukup banyak dan tidak tertampung sedangkan sekolah swasta daya tampungnya tidak merata.

b. Masalah mutu pendidikan

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat.

Dalam konteks mutu pendidikan mencakup input, proses, dan output pendidikan.

Secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia yaitu :

- Faktor internal (yang berasal dari jajaran dunia pendidikan) misal : system pendidikan, kualitas guru, biaya pendidikan, pola pengajaran, dan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi didalam dunia pendidikan.
- Faktor eksternal (yang berasal dari masyarakat) misal : anggapan sekolah negeri itu lebih baik dibanding swasta, anggapan tidak perlunya melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan karena terbatasnya biaya dan lain sebagainya.

c. Kelambanan dan ketidakefisienan lembaga pendidikan

Lembaga pendidikan adalah tempat transfer ilmu pengetahuan dan budaya (peradaban).

Tujuan pendidikan adalah mempersiapkan masyarakat baru yang ideal yaitu masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban dan berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa.

Esensi dari tujuan pendidikan adalah proses menumbuhkan bentuk budaya keilmuan, social, ekonomi dan politik yang lebih baik dalam perspektif tertentu harus mengacu pada masa depan yang jelas (pembukaan UUD 1945 alenia 4).

Prasyarat pengelolaan lembaga pendidikan harus berorientasi pada efektifitas, efisiensi, dan produktifitas.

Efisiensi dalam pengelolaan lembaga pendidikan merupakan hal penting terhadap kegiatan manajemen. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal.

Efisiensi dalam pengelolaan pendidikan diharapkan dapat mampu meningkatkan kesejahteraan sekolah, pemerataan, keadilan, dan demokratisasi dengan didasarkan atas 2 hal, yakni manajemen pendidikan yang professional, dan partisipasi dalam pengelolaan pendidikan yang meluas.

Hal-hal yang mempengaruhi kelambanan dan ketidakefisienan lembaga pendidikan :

- a. Tidak memiliki pemimpin yang fisioner
- b. Tidak memahami hakikat dan tujuan pendidikan
- c. Tidak menguasai manajemen lembaga pendidikan
- d. Kualitas SDM pengelola rendah
- e. Perencanaan kurang matang
- f. Tidak memiliki sumber-sumber daya yang potensial.

- d. Semakin lebarnya *gap* antara Negara maju dan Negara berkembang
 Indonesia menjadi Negara yang lumayan tertinggal jika harus dibandingkan dengan Negara-negara maju lainnya. Ini yang menjadi masalah besar bagi dunia pendidikan. Hal-hal yang menjadi masalah dalam pelebaran *gap* dengan Negara-negara maju adalah :
1. Teknologi pendidikan di Indonesia masih terbatas.
 2. Tenaga-tenaga pendidik/guru yang kurang pengalaman dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat teknologi pendidikan.
 3. Rendahnya mutu pendidikan Indonesia, yang menjadikan sekolah sebagai alat pentransferan ilmu saja namun belum menjadi pentranferan keahlian (profesi) dalam dunia pekerjaan yang semakin maju.
 4. Sarana dan prasarana pendidikan yang masih terbatas
 5. Biaya pendidikan di Indonesia yang teramat mahal dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat kurang mampu.
 6. System pendidikan yang masih belum bisa menjangkau tuntutan dan kebutuhan pembangunan
 7. Rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru
 8. Rendahnya prestasi siswa
 9. Rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia
 10. Kurangnya tenaga pengajar yang professional
 11. Minat masyarakat terhadap pendidikan masih sangat rendah
 12. Tujuan dan stategi pendidikan belum terarah dengan baik
 13. Inovasi pembelajaran masih sangat standar
 14. Perlunya pengembangan kurikulum yang efektif
 15. Masih kurangnya sekolah-sekolah yang berbasis/ berstandar internasional sehingga pengetahuan yang didapatkan masih sangat terbatas.

C. **Permasalahan Pendidikan di Indonesia**

1. **Permasalahan daya tampung.**

Masalah daya tampung siswa pasti terjadi setiap tahun, karena setiap tahun lembaga pendidikan akan menerima siswa baru untuk dididik sebagai siswa baru. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pemicu dari permasalahan daya tampung diantaranya :

- a. Semakin banyaknya jumlah calon siswa yang ingin masuk kedalam sekolah pada awal tahun, namun tidak disertai dengan kelas yg mencukupi.
- b. Kurang pemerataan siswa antara sekolah negri dengan sekolah swasta, hal ini terjadi karena masih banyak pandangan dari sebagian orang tua bahwa sekolah negri lebih unggul mutunya dan pengajarannya dibandingkan dengan sekolah swasta, terlebih lagi sekolah negri sampai tingkat SLTP tidak dipungut SPP.
- c. Biaya pendidikan yang relative tinggi disekolah swasta, sehingga bagi orang tua yang kurang mampu masih berfikir dua kali untuk menyekolahkan anaknya diswasta.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama disekolah negri, hal ini yang menjadi hambatan mengapa sekolah negri membatasi daya tampung siswa untuk diterima sebagai siswa baru disetiap tahunnya.
- e. Keterbatasan dana pendidikan yang diberikan kepada sekolah.
- f. Kurangnya tenaga pendidik/guru yang ada didalam sekolah, saat ini belum adanya pemerataan dalam penyebaran guru di Indonesia. Kita bisa melihat banyaknya sekolah-sekolah didesa-desa masih sangat minim tenaga

pengajarnya karena guru banyak terpusat didaerah perkotaan saja, ini menjadi masalah yang sangat serius karena kurangnya tenaga pendidik akan berperan sangat penting dalam maju atau tidaknya pendidikan disuatu sekolah, karena titik dari semua pengajaran dan pembelajaran ada pada pengajar, sehingga mengerti atau tidaknya siswa terhadap materi yang disajikan dan disampaikan tergantung dari gurunya itu sendiri.

- g. Kurang maksimalnya sekolah swasta dalam meyenggarakan program pendidikan karena banyaknya ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan dinas pendidikan dalam mengelola sekolah yang baik. Ini juga permasalahan penting, disaat sekolah negeri membatasi siswanya (daya tampung sekolah) maka besar harapannya sekolah swasta dapat menampung calon siswa yang tidak tersaring disekolah negeri, sehingga mereka dapat merasakan pendidikan yang sama dengan sekolah negeri, hanya saja siswa tersebut memang harus membayar SPP yang mungkin tidak dipungut disekolah negeri.

Pemecahannya :

- a. Permasalahan tidak adanya kelas seharusnya di Indonesia bukan menjadi masalah yang penting jika pemerintah lebih memperhatikan perbaikan dalam dunia pendidikan. Adanya anggaran pendidikan di setiap tahunnya dalam BOP & BOS dan APBN dapat menunjang dalam pengadaan kelas yang maksimal, sehingga tidak adanya masalah lagi dalam daya tampung siswa (tidak ada lagi kalimat “Saya tidak dapat sekolah karena kelasnya tidak cukup”).
- b. Kurangnya pemerataan siswa disekolah negeri dan sekolah swasta karena suatu anggapan sekolah negeri lebih baik dibandingkan swasta. Hal ini dapat disikapi dengan penyuluhan pemerintah kepada masyarakat bahwa sekolah swasta tidaklah jauh lebih buruk dari sekolah negeri, baik dari system pengajaran dan pembelajaran serta kurikulum yang mendukungnya. Selain itu, sekolah swasta juga bisa melakukan ekspansi kepada masyarakat dengan pembuktian-pembuktian yang baik dalam hal pencapaian target pendidikan yang dikelolanya. Sebagai contoh : budi yang sekolah disekolah negeri mendapatkan nilai UN rata-rata 8,00 sedangkan putri yang sekolah disekolah swasta bisa mendapatkan nilai UN rata-rata 8,50. Nah, dengan pembuktian seperti ini maka orang tua siswa tidaklah lagi bisa membandingkan pencapaian target antara sekolah negeri yang lebih bagus dengan sekolah swasta.
- c. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”. Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung

jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya. Biaya pendidikan swasta yang relative tinggi sehingga tidak bisa dicapai oleh orang tua siswa yang masih kurang mampu. Ini juga seharusnya bisa menjadi perhatian penting bagi pemerintah memberikan dana beasiswa bagi yang tidak mampu walau mereka bersekolah disekolah swasta. Ini bisa membantu mereka dalam proses belajar mengajar nantinya.

- d. Kurangnya guru bisa dipecahkan dengan adanya pemerataan terhadap SK PNS yang dapat diberikan pemerintah. SK ini dapat menunjang program daerah yang sangat membutuhkan banyak guru dalam melakukan proses pengajaran. Ini menjadi proyeksi penting bagi pemerintah, disaat pemerintah telah menetapkan standar kelulusan yang sama disetiap daerah namun tidak ditunjang oleh guru dan sarana pendidikan yang mencukupi maka sangatlah sulit. Teman-teman kita didaerah juga sangat membutuhkan kemudahan dalam pentransferan ilmu yang sampai kemereka untuk mengejar target kelulusan yang maksimal. Maka jika salahsatu masalah guru bisa dipecahkan maka tidaklah menjadi hal yang mustahil bahwa target kelulusan tertinggi di Indonesia dapat diraih oleh siswa didaerah terpencil.
- e. Pihak swasta harus meningkatkan kualitas pendidikan dan syarat-syarat tertentu dalam pendidikan (layaknya lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan itu sendiri) sehingga pendirian sekolah swasta begitu maksimal dalam mengentaskan siswa buta huruf yang tidak bisa tertampung disekolah negeri.

2. Pemasalahan mutu (kualitas) pendidikan

Permasalahan kualitas pendidikan di negara ini masih berada dalam potret yang buram dan masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Hasil survey tahun 2007 World Competitiveness Year Book memaparkan daya saing pendidikan dari 55 negara yang disurvei, Indonesia berada pada urutan 53.

Di samping itu, kualitas pendidikan tinggi Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Jika dilihat dari survei Times Higher Education Supplement (THES) 2006, perguruan tinggi Indonesia baru bisa menjebol deretan 250 yang diwakili oleh Universitas Indonesia, kualitas ini berada di bawah prestasi Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) yang menempati urutan 185. Kemudian pada tahun 2007 menurut survei THES perguruan tinggi di Indonesia masih belum dapat meyangi perguruan tinggi seperti di Singapur, Thailand dan seterusnya. Implikasi kualitas pendidikan rendah ini terhadap sumber daya manusia sangat jelas sekali. Kemampuan sumber daya manusia Indonesia jauh tertinggal, hal ini dapat dilihat dari hasil riset Ciputra yang menyatakan bahawa Indonesia hanya baru mempunyai 0,18% pengusaha dari jumlah penduduk sedangkan syarat untuk menjadi negara maju minimal 2% dari jumlah penduduk harus ada pengusaha. Saat sekarang singapur sudah mempunyai 7% dan Amerika Serikat 5% dari jumlah penduduk. Dampak yang lain dari rendahnya kualitas pendidikan dapat dilihat dari Human Development Index (HDI) Indonesia. Menurut laporan United Nation Development Programe/UNDP HDI pada tahun 2007 dari 177 negara yang dipublikasikan HDI Indonesia berada pada urutan ke-107. Indonesia

memperoleh indeks 0,728. Di kawasan ASEAN Indonesia menempati urutan ke-7 dari sembilan negara ASEAN yang dipublikasikan. Peringkat teratas di ASEAN adalah Singapura dengan HDI 0,922, disusul Brunei Darussalam 0,894, Malaysia 0,811, Thailand 0,781, Filipina 0,771, dan Vietnam 0,733. Sedangkan Kamboja 0,598 dan Myanmar 0,583 berada di bawah HDI Indonesia.

Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentunya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru-guru berpengalaman yang pensiun.

“Pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas di Gedung Depdiknas, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (12/3/2007). Presiden memaparkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu:

1. Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah, yakni meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnya dari angka partisipasi.
2. Langkah kedua, menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti ketidakmerataan didesa dan dikota serta gender.
3. Langkah ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional.
4. Langkah keempat, pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan. Untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan.
5. Langkah kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah.
6. Langkah keenam, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Untuk tahun ini dianggarkan Rp 44 triliun.
7. Langkah ketujuh, adalah penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan. Langkah terakhir, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan.

Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia :

Di bawah ini akan diuraikan beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia secara umum, yaitu:

a. Efektifitas Pendidikan Di Indonesia

Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik (dosen, guru, instruktur, dan trainer) dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Selama

ini, banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia. Tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Anggapan seperti itu jugalah yang menyebabkan efektifitas pengajaran di Indonesia sangat rendah. Setiap orang mempunyai kelebihan dibidangnya masing-masing dan diharapkan dapat mengambil pendidikan sesuai bakat dan minatnya bukan hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain. Dalam pendidikan di sekolah menengah misalnya, seseorang yang mempunyai kelebihan dibidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA akan menghasilkan efektifitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal-hal seperti itulah yang banyak terjadi di Indonesia. Dan sayangnya masalah gengsi tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan rendahnya efektifitas pendidikan di Indonesia.

b. Efisiensi Pengajaran Di Indonesia

Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektifitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih 'murah'. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati.

Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahal biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik.

Jika kita berbicara tentang biaya pendidikan, kita tidak hanya berbicara tentang biaya sekolah, training, kursus atau lembaga pendidikan formal atau informal lain yang dipilih, namun kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buku, dan berbicara tentang biaya transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih. Di sekolah dasar negeri, memang benar jika sudah diberlakukan pembebasan biaya pengajaran, namun peserta didik tidak hanya itu saja, kebutuhan lainnya adalah buku teks pengajaran, alat tulis, seragam dan lain sebagainya yang ketika kami survey, hal itu diwajibkan oleh pendidik yang bersangkutan. Yang mengejutkannya lagi, ada pendidik yang mewajibkan les kepada peserta didiknya, yang tentu dengan bayaran untuk pendidik tersebut.

Selain masalah mahal biaya pendidikan di Indonesia, masalah lainnya adalah waktu pengajaran. Dengan survey lapangan, dapat kita lihat bahwa pendidikan tatap muka di Indonesia relative lebih lama jika dibandingkan negara lain. Dalam pendidikan formal di sekolah menengah misalnya, ada sekolah yang jadwal pengajarannya perhari dimulai dari pukul 07.00 dan diakhiri sampai pukul 16.00.. Hal tersebut jelas tidak efisien, karena ketika kami amati lagi, peserta didik yang mengikuti proses pendidikan formal yang

menghabiskan banyak waktu tersebut, banyak peserta didik yang mengikuti lembaga pendidikan informal lain seperti les akademis, bahasa, dan sebagainya. Jelas juga terlihat, bahwa proses pendidikan yang lama tersebut tidak efektif juga, karena peserta didik akhirnya mengikuti pendidikan informal untuk melengkapi pendidikan formal yang dinilai kurang. Yang kami lihat, kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misalnya saja, pengajar A mempunyai dasar pendidikan di bidang bahasa, namun di mengajarkan keterampilan, yang sebenarnya bukan kompetensinya. Hal-tersebut benar-benar terjadi jika kita melihat kondisi pendidikan di lapangan yang sebenarnya. Hal lain adalah pendidik tidak dapat mengomunikasikan bahan pengajaran dengan baik, sehingga mudah dimengerti dan membuat tertarik peserta didik.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita menggunakan sistem pendidikan kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi yang mengubah proses pengajaran menjadi proses pendidikan aktif, hingga kurikulum baru lainnya. Ketika mengganti kurikulum, kita juga mengganti cara pendidikan pengajar, dan pengajar harus diberi pelatihan terlebih dahulu yang juga menambah cost biaya pendidikan. Sehingga amat disayangkan jika terlalu sering mengganti kurikulum yang dianggap kurang efektif lalu langsung menggantinya dengan kurikulum yang dinilai lebih efektif.

Konsep efisiensi akan tercipta jika keluaran yang diinginkan dapat dihasilkan secara optimal dengan hanya masukan yang relative tetap, atau jika masukan yang sekecil mungkin dapat menghasilkan keluaran yang optimal. Konsep efisiensi sendiri terdiri dari efisiensi teknologis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknologis diterapkan dalam pencapaian kuantitas keluaran secara fisik sesuai dengan ukuran hasil yang sudah ditetapkan. Sementara efisiensi ekonomis tercipta jika ukuran nilai kepuasan atau harga sudah diterapkan terhadap keluaran.

c. Standardisasi Pendidikan Di Indonesia

Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standardisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati proses untuk menentukan standar yang akan diambil. Seperti yang kita lihat sekarang ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya keranjingan terhadap standar dan kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi, demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standardisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

Selain itu, akan lebih baik jika kita mempertanyakan kembali apakah standar pendidikan di Indonesia sudah sesuai atau belum. Dalam kasus UAN yang hampir selalu menjadi kontroversi misalnya. Kami menilai adanya sistem evaluasi seperti UAN sudah cukup baik, namun yang kami sayangkan adalah evaluasi pendidikan seperti itu yang menentukan lulus tidaknya peserta didik mengikuti pendidikan, hanya dilaksanakan sekali saja tanpa melihat proses yang dilalu peserta didik yang telah menenuh proses pendidikan selama

beberapa tahun. Selain hanya berlanhsug sekali, evaluasi seperti itu hanya mengevaluasi 3 bidang studi saja tanpa mengevaluasi bidang studi lain yang telah didikuti oleh peserta didik.

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga tentu tidak hanya sebatas yang kami bahas di atas. Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan kita. Tentunya hal seperti itu dapat kita temukan jika kita menggali lebih dalam akar permasalahannya. Dan semoga jika kita mengetahui akar permasalahannya, kita dapat memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia sehingga jadi lebih baik lagi. Selain beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan di atas, berikut ini akan dipaparkan pula secara khusus beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

d. Rendahnya kualitas pendidikan

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

Data Balitbang Depdiknas (2003) menyebutkan untuk satuan SD terdapat 146.052 lembaga yang menampung 25.918.898 siswa serta memiliki 865.258 ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas tersebut sebanyak 364.440 atau 42,12% berkondisi baik, 299.581 atau 34,62% mengalami kerusakan ringan dan sebanyak 201.237 atau 23,26% mengalami kerusakan berat. Kalau kondisi MI diperhitungkan angka kerusakannya lebih tinggi karena kondisi MI lebih buruk daripada SD pada umumnya. Keadaan ini juga terjadi di SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK meskipun dengan persentase yang tidak sama.

e. Rendahnya Kualitas Guru

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan sbb: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta). Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Data Balitbang Depdiknas (1998) menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, dari sekitar 680.000 guru SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3-

Kependidikan ke atas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidikan S3). Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

f. Rendahnya Kesejahteraan Guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan serbesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta. guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya (Republika, 13 Juli, 2005). Dengan adanya UU Guru dan Dosen, barangkali kesejahteraan guru dan dosen (PNS) agak lumayan. Pasal 10 UU itu sudah memberikan jaminan kelayakan hidup. Di dalam pasal itu disebutkan guru dan dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang diangkat pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhak atas rumah dinas. Tapi, kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. Diberitakan Pikiran Rakyat 9 Januari 2006, sebanyak 70 persen dari 403 PTS di Jawa Barat dan Banten tidak sanggup untuk menyesuaikan kesejahteraan dosen sesuai dengan amanat UU Guru dan Dosen (Pikiran Rakyat 9 Januari 2006).

g. Rendahnya Prestasi Siswa

Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Menurut Trends in Mathematic and Science Study (TIMSS) 2003 (2004), siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat. Dalam hal prestasi, 15 September 2004 lalu United Nations for Development Programme (UNDP) juga telah mengumumkan hasil studi tentang kualitas manusia secara serentak di seluruh dunia melalui laporannya yang berjudul Human Development Report 2004. Di dalam

laporan tahunan ini Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dari 177 negara. Apabila dibanding dengan negara-negara tetangga saja, posisi Indonesia berada jauh di bawahnya. Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda.

h. Rendahnya Relevansi Pendidikan Dengan Kebutuhan

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, Diploma/S0 sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.

Pemecahannya :

Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, secara garis besar ada dua solusi yang dapat diberikan yaitu:

Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan.

Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.

Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya.

3. Permasalahan Kelambanan dan ketidakefisienan lembaga pendidikan

Hal-hal yang mempengaruhi kelambanan dan ketidakefisienan lembaga pendidikan :

- Tidak memiliki pemimpin yang fisioner
- Tidak memahami hakikat dan tujuan pendidikan
- Tidak menguasai manajemen lembaga pendidikan
- Kualitas SDM pengelola rendah
- Perencanaan kurang matang
- Tidak memiliki sumber-sumber daya yang potensial

Pemecahannya :

Sebelum mendirikan sebuah lembaga pendidikan maka harus menggunakan perencanaan yang matang, diantaranya sebuah lembaga harus memilih calon pemimpin yang fisioner, yang punya tujuan pendidikan yang baik, yang mengerti arah dan dinamika pendidikan sehingga tidak menjadikan pendidikan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan semata tetapi pendidikan dapat dijadikan sarana dalam mencerdaskan bangsa, sehingga menghasilkan anak-anak didik yang potensial dalam membangun bangsa.

4. Ketiga masalah diatas menyebabkan terjadinya pelebaran gap antara Negara-negara maju dan Negara berkembang.

Hal-hal yang menjadi masalah dalam pelebaran gap dengan Negara-negara maju adalah :

- ✓ Teknologi pendidikan di Indonesia masih terbatas.
- ✓ Tenaga-tenaga pendidik/guru yang kurang pengalaman dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat teknologi pendidikan.
- ✓ Rendahnya mutu pendidikan Indonesia, yang menjadikan sekolah sebagai alat pentransferan ilmu saja namun belum menjadi pentranferan keahlian (profesi) dalam dunia pekerjaan yang semakin maju.
- ✓ Sarana dan prasarana pendidikan yang masih terbatas
- ✓ Biaya pendidikan di Indonesia yang teramat mahal dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat kurang mampu.
- ✓ System pendidikan yang masih belum bisa menjangkau tuntutan dan kebutuhan pembangunan
- ✓ Rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru
- ✓ Rendahnya prestasi siswa
- ✓ Rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia
- ✓ Kurangnya tenaga pengajar yang professional
- ✓ Minat masyarakat terhadap pendidikan masih sangat rendah
- ✓ Tujuan dan stategi pendidikan belum terarah dengan baik
- ✓ Inovasi pembelajaran masih sangat standar
- ✓ Perlunya pengembangan kurikulum yang efektif
- ✓ Masih kurangnya sekolah-sekolah yang berbasis/ berstandar internasional sehingga pengetahuan yang didapatkan masih sangat terbatas.

Oleh karena itu pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal, kita sebagai pendidik maka bertanggungjawab dalam mengejar ketertinggalan itu dengan menciptakan anak-anak didik yang punya kualitas optimal yaitu mempunyai kecerdasan intelektual, emosional dan kecerdasan akhlaq yang menjadi point terpenting dalam pendidikan.

KESIMPULAN

1. Masalah pendidikan adalah tidak terpenuhinya antara tujuan dan harapan yang diinginkan didalam pendidikan dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi dilapangan.
2. Masalah pendidikan menurut P.H Combs dibagi menjadi 4 Kelompok, yaitu :
 - a. Masalah daya tampung
 - b. Masalah mutu pendidikan (kualitas pendidikan)
 - c. Masalah kelambanan dan ketidak efisienan lembaga pendidikan
 - d. Semakin lebarnya *gap* antara Negara maju dan Negara berkembang.

Demikianlah tulisan ini saya susun, semoga bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Qomaruzzaman, Bambang, Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2011.
- Rochman, Caerul dan Edi Warsidi, Membangun Disiplin dalam Mendidik, Bandung : Putra Setia , 2011.
- Sanjaya, Dr. Wina MPd, Strategi Pembelajaran : Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007.
- Sholehuddin, Pendidikan Sebagai Basis Penguatan Kerukunan Masyarakat, Depok: CV. Bina Muda Cipta kreasi, 2010.
- Sulhan, Drs.Najib MA, Karakter Guru Masa Depan Sukses & Bermartabat, Surabaya: PT. Temprina Media Grafika, 2010.
- Sulhan, Drs.Najib MA, Pendidikan Berbasis Karakter : Sinergi antara Sekolah dan Rumah Dalam Membentuk Karakter Anak, PT.Temprina Media Grafika, 2009.